



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	c28
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Walinagari Diminta Hati-hati Kelola Dana Desa

PADANG - SINGGALANG

Walinagari se-Sumbar terutama yang baru dilantik, diingatkan untuk hati-hati kelola dana desa. Sebab, kalau salah apalagi menyimpang bisa-bisa berujung ke penjara. Bila sudah berurusan ke sini, secara moral akan anjlok dan menjadi beban psikis pula bagi keluarga.

“Sejak beberapa tahun belakangan, dana yang dikelola cukup banyak di desa, mulai dana desa yang bersumber dari APBN, dana yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten, termasuk dana pendapatan desa,” kata Irwan, dalam acara bimbingan teknik peningkatan kapasitas bagi walinagari/kepala desa yang baru dilantik (non-petahana), beberapa waktu di Padang.

Dengan dana yang cukup banyak masuk ke desa, jika dimanfaatkan sesuai dengan prosedur penggunaan dan administrasinya, maka pemba-

ngunan di nagari menggeliat. Perekonomian masyarakat juga bergerak naik.

Sebaliknya, jika penggunaannya tidak tepat sasaran apalagi mengabaikan regulasi maupun mekanisme yang berlaku, maka aparat hukum akan menciumnya. Masyarakat juga akan membuka tabir itu. Ujung-ujungnya berurusan dengan hukum dan bisa-bisa harus menginap di penjara.

Menurut Irwan, sudah banyak mantan-mantan kepala desa masuk penjara karena salah dalam mengelola uang desa. Agar tidak ada kepala desa masuk penjara, maka penggunaan dana di nagari mesti jelas, transparan.

Dan yang terpenting sekali, sesuaikan dengan perencanaan. Karena itu, dalam aspek perencanaan harus dimatangkan betul. Libatkan berbagai pihak terkait dalam menyusun perencanaan ini agar dalam pelaksanaannya tidak salah sasaran.

“Jangan sampai bantuan

pembangunan itu terbengkalai gara-gara tidak dilaksanakan karena perencanaan tidak matang. Sebab bila terbengkalai juga dapat membuat kepentingan rakyat teraniaya,” ungkap Irwan.

Irwan juga minta pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan kepada walinagari/kepala desa. Apalagi walinagari/kepala desa yang baru mengemban amanah yang tentu saja diawal menjadi pemimpin itu, banyak hal yang akan menjadi ‘beban’, bila tidak tegas dan taat pada aturan yang berlaku.

“Hal ini guna menghindari terjadinya persoalan hukum bagi walinagari, mengingat tidak seluruh walinagari yang memiliki latar pendidikan yang memadai seperti pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Gubernur menyatakan, pemerintah saat ini, memberikan perhatian pada desa, yakni ban-

tuhan berupa dana desa yang cukup besar, yang diswakelola oleh Kepala Desa. Untuk itu, dalam perencanaannya, juga turut didampingi dan diawasi oleh camat dan beserta bupati.

Terutama memenuhi syarat-syarat administrasi terkait pencairan anggaran, bisa segera asal syaratnya lengkap. Syarat tersebut, antara lain adanya Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan.

Gubernur juga mengimbau dalam pengelolaan dana desa di nagari mesti dilakukan secara kompak, duduk bersama. Jangan merasa walinagari lebih tinggi lalu berjalan sendiri, tokoh-tokoh masyarakat jangan pula mendahulukan kepentingan sepihak.

Dan yang terpenting menyamakan persepsi bersama stakeholder serta pemangku kepentingan di sebuah nagari, bagaimana kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan baik serta mendapat dukungan semua pihak. (104)